

# UPAYA PEMERTAHANAN BAHASA-BUDAYA SUNDA DI TENGAH PENGARUH GLOBALISASI

T. Fatimah Djaja Sudarma, Wahya, Elvi Citraresmana, Dian Indira, Teddi Muhtadin,  
dan Hera Meganova Lyra

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran  
e-mail fatimah.djajasudarma@unpad.ac.id

## Abstrak

Pengabdian pada masyarakat yang telah dilaksanakan berupa penguatan pendidikan karakter melalui pelatihan kompetensi pendidik melalui pembelajaran bahasa daerah berbasis karakter. Masyarakat sasaran dalam kegiatan ini adalah para guru sekolah dasar se-Kecamatan Jatinangor. Guru adalah dasar utama dalam proses kegiatan belajar mengajar yang akan mentransfer ilmunya kepada para siswa yang merupakan generasi potensial yang perlu dibekali dengan berbagai sumber pengetahuan. Melalui kegiatan PPM ini para guru bersama para dosen bersama-sama melihat fenomena kebahasaan yang menimpa bahasa daerah Sunda dan bersama-sama mencari solusinya. Keterlibatan para peserta dalam pelatihan dilakukan secara aktif. Kegiatan pelatihan (*workshop*) diawali dengan pembahasan terkait materi upaya pemertahanan bahasa-budaya Sunda di tengah pengaruh globalisasi dan diakhiri dengan para guru menuliskan pengalaman masing-masing dalam mengajarkan bahasa Sunda di sekolah dasar. Manfaat pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran bahasa Sunda berbasis karakter.

**Kata Kunci:** bahasa Sunda, sekolah dasar, pendidikan karakter

## PENDAHULUAN

Bahasa dan budaya daerah atau lokal di Indonesia, termasuk di dalamnya bahasa dan budaya Sunda, secara sosiologis merupakan aset yang sangat berharga dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dan maju di tengah persaingan negara-negara lain di dunia. Sebagai aset yang sangat berharga, keberadaan keberagaman budaya dan bahasa tersebut perlu terus dikembangkan, dibina, dan dilindungi. Jika budaya dan bahasa ini tidak dipelihara, tidak mustahil budaya dan bahasa ini lambat laun akan punah (Alwasilah, 2000: 21). Budaya dan bahasa lokal di Indonesia bukan hanya kekayaan milik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kekayaan dunia. Oleh karena itu, secara yuridis dan praktis diperlukan upaya untuk dapat melestarikan budaya dan bahasa tersebut di tengah derasnya pengaruh globalisasi. Jangan sampai budaya dan bahasa daerah ini tidak lagi menjadi kekayaan masyarakatnya.

### Keberadaan Bahasa dan Budaya Sunda

Bahasa Sunda yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki kekhasan. Dari hasil pengamatan dan penelitian para pakar diketahui bahwa bahasa Sunda yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Banten, misalnya, yang merupakan variasi geografis, memiliki keunikan akibat terjadinya persentuhan di antara bahasa-bahasa daerah di sana (Suriamiharja dkk., 1971: 4-5; Nothofer, 1977: 59; Hardjasudjana dkk., 1978: 2; Iskandarwasid dkk., 1985: -2, Sumantri, 1993: 3 Lauder, 1993: 20). Hal ini dapat diamati pada bahasa Sunda yang digunakan oleh etnis Baduy di Lebak. Keberagaman dan kekhasan bahasa Sunda ini merupakan aset yang luar biasa yang memerlukan perlindungan dari masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah

Namun secara filosofis, seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi yang memengaruhi kebiasaan dan sikap hidup masyarakat, bahasa Sunda yang tersebar secara geografis di Jawa Barat, Banten, dan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Banten tersebut berhadapan dengan berbagai masalah. Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara pun ikut memengaruhi kehidupan bahasa Sunda. Demikian pula kebudayaan Sunda.

Banyak faktor yang menyebabkan mulai hilangnya bahasa ibu, salah satunya lingkungan yang tidak mendukung, baik dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitarnya. Bahan bacaan untuk masyarakat, seperti surat kabar atau majalah berbahasa daerah belum tersedia. Sebagai sumber belajar dan informasi, bacaan tersebut perlu diterbitkan untuk memenuhi keperluan berliterasi masyarakat. Tidak mustahil telah terjadi penurunan jumlah penutur bahasa Sunda, terutama di perkotaan. Penurunan jumlah penutur bahasa daerah di wilayah perkotaan disebabkan mereka beralih ke bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat di wilayah perkotaan tersebut. Persentuhan dua bahasa dalam masyarakat multilingual sering menimbulkan percampuran bahasa, pergeseran bahasa, bahkan kepunahan bahasa. Menurut Weinreich (1970: 1), persentuhan bahasa ini menyebabkan kontak bahasa. Bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki pengaruh yang besar terhadap penggunaan bahasa Sunda ini. Situasi kebahasaan seperti ini jika tidak segera diatasi dapat memengaruhi fungsi bahasa Sunda. Persentuhan dua bahasa inilah yang menimbulkan masalah bilingualisme bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Hal penting yang perlu diketahui dan disadari semua pihak dalam kaitan budaya dan bahasa daerah adalah masalah pewarisan. Rosidi (2006: xiv-xvii) berpendapat bahwa pewarisan ini terkait dengan pewarisan keterampilan dan pewarisan apresiasi kepada generasi yang lebih muda. Budaya, termasuk kesenian, tanpa diapresiasi lama-kelamaan akan punah. Dalam kaitan bahasa Sunda, Wahya dan Adji (2016: 81-82) berpendapat bahwa masalah penerusan antargenerasi menjadi salah satu faktor kurangberhasilan pengajaran bahasa Sunda di Jawa Barat. Orang tua, apalagi yang hidup di perkotaan, sudah jarang mengajak anak-anaknya berbahasa Sunda. Demikian pula di sekolah, anak-anak lebih sering berbahasa Indonesia saat berbicara dengan teman, guru, dan penjaga sekolah. Kehadiran sekolah ternyata tidak dapat menjadi tempat belajar bahasa daerah yang optimal tanpa peran serta orang tua dan masyarakat. Hal serupa dapat terjadi di kota-kota besar, termasuk di Bandung. Orang tua dan masyarakat dengan segenap kesadaran harus membantu anak-anak dalam belajar bahasa daerah karena itu menjadi tanggung jawab mereka. Dunia pendidikan sebagai salah satu saluran untuk pewarisan budaya dan bahasa harus dapat menampilkan budaya dan bahasa sebagai mata pelajarannya dengan jumlah jam yang memadai apalagi di perkotaan karena orang tua di rumah tidak dapat lagi diharapkan. Lauder (2015) yang menjelaskan bahwa laporan Unesco yang menyebutkan hanya 30% saja bahasa di dunia yang mengalami penerusan antargenerasi menunjukkan bahwa 70% bahasa di dunia tidak mengalami penerusan antargenerasi. Artinya, 70% bahasa di dunia terancam punah. Ini harus mendapatkan perhatian masyarakat dunia. Oleh karena itu, upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan budaya Sunda di berbagai daerah harus segera dilaksanakan dengan berpayung pada kebijakan pemerintah pusat setempat sebelum bahasa Sunda itu tidak dikenal dalam kehidupan anak-anak sebagai generasi penerus. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Sunda bukanlah hal yang mudah karena menyangkut masalah sikap. Perlu dilakukan berbagai upaya, baik di sekolah, di rumah, maupun di dalam masyarakat untuk menumbuhkan sikap positif berbahasa Sunda. Bahasa Indonesia yang memiliki fungsi lebih luas dibandingkan dengan bahasa daerah, secara sosiolinguistik memiliki gengsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa daerah. Merupakan hal yang wajar jika para penutur bahasa daerah beralih menjadi penutur bahasa Indonesia. Namun, hal ini tidak dapat dibiarkan. Bahasa daerah sebagai kekayaan budaya daerah, juga budaya nasional, bahkan budaya dunia, yang kaya dengan nilai-nilai budaya daerah dan karakter harus terus dihidupkan penggunaannya.

Bahasa Sunda demikian penting dilestarikan karena menyimpan ilmu pengetahuan dan tata nilai budaya, baik dalam bentuk kosakata, ungkapan, peribahasa, karya sastra baik lisan, maupun tulisan.

Dengan demikian, perlu dilakukan berbagai upaya untuk melestarikannya.

### **Peranan Dunia Pendidikan dalam Pelestarian Bahasa dan Budaya**

Bahasa sebagai salah satu kekayaan budaya hanya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, regulasi pemakaian bahasa harus menyentuh dunia pendidikan. Artinya, bahasa harus diajarkan secara resmi di satuan pendidikan tertentu, bahkan di jenjang yang paling rendah, misalnya di PAUD karena tingkat ini merupakan tingkat awal belajar bahasa. Sayangnya, sering bahasa daerah tidak diperkenalkan di PAUD ini karena belum adanya regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur pengenalan bahasa daerah di jenjang pendidikan paling awal ini, bukan hanya di Provinsi Jawa Barat, bahkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Bahasa Sunda yang tersebar di berbagai provinsi belum secara menyeluruh dijadikan muatan lokal. Tentu, untuk keperluan ini perlu dirancang dan dipersiapkan berbagai fasilitas. Pengajaran Bahasa Sunda di sekolah memerlukan bahan ajar. Dengan terbitnya buku ajar bahasa Sunda dan buku penunjang, satuan pendidikan yang memerlukannya kini tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan ajar Bahasa Sunda tersebut. Namun, apakah bahan ajar ini telah layak sebagai sumber belajar bahasa Sunda? Diperlukan penelitian oleh para pakar.

Upaya pendokumenan sastra lisan, folklor, naskah, lagu dan permainan tradisional berbahasa daerah pada setiap daerah berpenutur bahasa Sunda yang merupakan sumber pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, dan karakter lokal belum sepenuhnya dilakukan. Produk budaya di atas dapat dijadikan materi ajar di sekolah di daerah-daerah berbahasa Sunda. Tentu untuk melakukan itu semua diperlukan payung hukum yang kuat, yakni melalui peraturan daerah.

Bahasa daerah, termasuk bahasa Sunda memiliki kedudukan yang strategis sebagai sarana kebudayaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 dijelaskan bahwa bahasa daerah akan dihormati dan dipelihara oleh negara. Kedudukan bahasa daerah juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Bab II Pasal 4. Dalam Undang-undang yang sama pada Pasal 6 ayat (1), yakni bahasa daerah berfungsi sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) dinyatakan pula bahasa daerah berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung bahasa Indonesia dan sumber pengembangan bahasa Indonesia. Jelaslah,

keberadaan bahasa daerah, termasuk bahasa Sunda secara yuridis memiliki kekuatan hukum. Artinya, pengutaman dan pelestarian bahasa Sunda ada dasar hukumnya.

Pengajaran bahasa Sunda dengan status muatan lokal wajib perlu dipertimbangkan kembali. Mengapa demikian? Status mutan lokal memiliki dampak psikologis terhadap siswa berupa kurang sungguh-sungguhnya siswa belajar bahasa Sunda karena tidak berdampak pada kelulusan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan status ini. Sebaiknya bahasa Sunda merupakan pelajaran yang memengaruhi kelulusan. Harus ada keberanian pada pemerintah daerah untuk mengangkat status pelajaran bahasa Sunda ini. Penetapan status pelajaran hanya dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penetapan status ini termasuk bagian dari perencanaan bahasa dalam pendidikan. Jernudd dan Gupta (1971) dalam Muslich dan Oka (2010: 7) berpendapat bahwa pemerintah yang berkuasa dapat menjadi penggerak dan kunci keberhasilan perencanaan bahasa.

Bahasa pengantar untuk pelajaran bahasa Sunda sebaiknya menggunakan bahasa Sunda kecuali jika ada hal yang tidak memungkinkan untuk itu. Bahkan, mata pelajaran lain pun dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa ibu. Menurut Moeliono (2011: 135), pendidikan yang sedapat-dapatnya diberikan dengan perantaraan bahasa ibu menyumbangkan perkembangan kecendekiaan pelajarannya. Menurut Wibisana (2011: 29-30), penggunaan bahasa pengantar bahasa Sunda di sekolah bergantung kondisi kebahasaan masyarakat setempat.

### **Peningkatan Gengsi Bahasa dan Budaya Sunda**

Bahasa baru dirasakan keberadaannya jika memiliki fungsi sosial. Artinya, bahasa itu memiliki fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat penuturnya, yakni dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengungkap gagasan dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Para filsuf memiliki pandangan yang beragam mengenai fungsi bahasa ini walaupun semuanya berpandangan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi (Mustansyir, 1988: 25—37; Aslinda dan Syafyahya, 2007, 89--92). Secara sosiolinguistik, sebuah bahasa cenderung tetap hidup jika memiliki fungsi sosial dalam masyarakat penuturnya. Menurut Wahya (2016: 27—28) bahasa secara dinamis akan mengadakan perubahan untuk memenuhi keperluan sosial penuturnya tersebut. Sebuah bahasa yang dianggap sudah tidak memiliki fungsi sosial akan ditinggalkan penuturnya. Bahasa yang ditinggalkan penuturnya lambat laun akan mati atau punah. Bahasa dengan tingkat gengsi yang tinggi cenderung akan lebih bertahan lama dibandingkan dengan bahasa dengan tingkat gengsi yang rendah. Bahasa dengan

tingkat gengsi yang tinggi adalah bahasa yang memiliki fungsi sosial yang tinggi. Bahasa yang memiliki fungsi sosial yang tinggi adalah bahasa yang kaya dengan laras bahasa atau register, yakni variasi bahasa dalam beragam ranah pemakaian. Bahasa Indonesia termasuk kaya dengan beragam ranah pemakaian dibandingkan dengan bahasa daerah. Bahasa yang rendah fungsi sosialnya dapat ditingkatkan fungsinya melalui perencanaan bahasa. Pemerinatah dapat memfasilitasi sebuah perencanaan bahasa dengan lebih Bahasa yang digunakan masyarakat akan terus berubah mengikuti perubahan sosial masyarakat tersebut. Sikap masyarakat terhadap bahasa pun dapat berubah (Alwasilah, 2000: 58). Masyarakat dapat saja tidak lagi menggunakan bahasanya karena berbagai faktor, misalnya, karena tidak memiliki kemampuan menggunakan bahasa tersebut atau bahasa tersebut dipandang tidak lagi memiliki gengsi karena bahasa tersebut, misalnya, tidak dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti meningkatkan kehidupan ekonomi. Faktor di atas menurut Sumarsono (2007: 284) merupakan aspek sosiolinguistik. Faktor ini bersama aspek linguistik merupakan aspek kepunahan bahasa.

Sikap setia, bangga, dan hormat terhadap suatu bahasa merupakan sikap positif berbahasa. Jika penutur suatu bahasa sudah tidak lagi setia, bangga, dan hormat terhadap bahasa, penutur tersebut memiliki sikap negatif terhadap bahasa. Penutur yang bersifat negatif terhadap bahasa, lambat laun akan meninggalkan bahasa tersebut. Pandangan terhadap suatu bahasa bahwa bahasa itu tidak memiliki nilai dalam kehidupan, tidak dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, kurang bergengsi, sulit dipelajari, dan berbahasa dengan sering melanggar kaidah merupakan sebagian indikator dari sikap negatif terhadap bahasa. Sekolah harus mampu membentuk peserta didik yang memiliki sikap positif terhadap bahasa, baik terhadap bahasa daerah, yang dipelajari di sekolah tersebut. Sekolah di Indonesia memiliki kewajiban membentuk peserta didik yang memiliki sikap positif terhadap bahasa, sebagai ranah emosi atau afektif, di samping mengetahui dan memahami bahasa, sebagai ranah kognisi atau kognitif, dan mampu menggunakan atau mempraktikkan bahasa, sebagai ranah konasi atau psikomotorik (Chaer dan Agustina, 2010: 150). Dalam berliterasi bahasa ketiga ranah itu tidak boleh diabaikan.

Negara dengan multibudaya dan multibahasa, seperti Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah kebahasaan. Masalah ini harus mendapatkan penanganan yang bijak agar tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Untuk menangani masalah di atas, pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, sudah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan wewenangnya masing-masing dalam upaya

mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan sosial, budaya, politik, ekonomi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah-masalah baru muncul, antara lain terjadinya persaingan bahasa, pergeseran bahasa, kepunahan bahasa, dan kurang berhasilnya pengajaran bahasa.

Terkait dengan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah, dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Secara khusus keberadaan bahasa Sunda di Jawa Barat, misalnya, dilindungi oleh berbagai peraturan daerah. Bahasa Sunda sebagai bahasa ibu sebagian besar masyarakat Jawa Barat diajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah. Namun, fakta yang dapat diamati di lapangan kemampuan siswa berbahasa Sunda tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebabnya, baik faktor internal bahasa maupun faktor eksternal bahasa; baik faktor penutur maupun faktor di luar penutur. Keadaan seperti ini tentu tidak dapat dibiarkan, harus ada solusinya demi pemertahanan bahasa Sunda sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah dan budaya bangsa, bahkan budaya dunia.

Masalah literasi merupakan masalah global. Masalah ini muncul terutama di negara yang multibudaya dan multibahasa. Persaingan antarbahasa sering menyebabkan pergeseran bahasa (lihat Wahya dan Adji, 2016: 82). Bahasa yang dominan, misalnya, bahasa nasional, sering mengalahkan bahasa yang tidak dominan, misalnya, bahasa lokal. Untuk tetap mempertahankan keberadaan bahasa yang tidak dominan, bahasa tersebut harus diperkuat dengan perencanaan atau manajemen yang baru, terutama dalam dunia pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghidupkan literasi dalam dunia pendidikan tersebut.

### **Penerusan Antargenerasi Bahasa dan Budaya Sunda yang mengalami Kemacetan**

Masalah penerusan antargenerasi bahasa-bahasa yang ada di dunia sudah menjadi masalah global. Masalah sosiolinguistik ini merupakan salah satu masalah dari beberapa masalah yang menyebabkan pergeseran dan kepunahan bahasa. Di dalam keluarga, banyak orang tua tidak mengajarkan bahasa Sunda terhadap anak-anaknya. Banyak orang tua, terutama yang masih muda, kurang menguasai bahasa Sunda sehingga tidak dapat membantu anak-anaknya dalam mengerjakan tugas pelajaran bahasa Sunda yang dibawa dari sekolah. Orang tua yang seharusnya melaksanakan pembelajaran bahasa Sunda terhadap

anak-anaknya sudah tidak dapat diharapkan. Keadaan seperti ini secara sosiolinguistik sangat berpengaruh buruk terhadap penguasaan bahasa tersebut oleh anak-anak.

Bahasa daerah di Indonesia mengalami pasang surut perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa daerah yang diajarkan sebagai muatan lokal wajib di sekolah-sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya indikasi rendahnya kemampuan berbahasa daerah para siswa sekolah dasar. Mereka sering tidak menggunakan bahasa daerah secara penuh dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Ada kekhawatiran lama-lama para siswa tidak mampu lagi menggunakan bahasa daerah sebagai jati diri orang tuanya dan bernas dengan nilai-nilai kearifan. Jika ini terjadi, bahasa daerah diambang kepunahan karena tidak ada generasi penerus yang dapat berbahasa daerah. Untuk itu, lembaga pendidikan sebagai fasilitas penerusan antargenerasi bahasa daerah di luar keluarga perlu dievaluasi perannya. Demikian pula, sistem pelajaran bahasa daerah, termasuk kurikulum, bahan ajar, metode pengajaran, dan pengajarnya. Ini perlu dilakukan segera sebelum terjadi bencana yang lebih besar terhadap bahasa daerah di Indonesia.

### **Penutup**

Lembaga pendidikan merupakan salah satu fasilitas untuk melaksanakan penerusan antargenerasi bahasa daerah melalui jalur formal. Selayaknyalah strategi ini dipertahankan dalam upaya melestarikan dan mempertahankan bahasa daerah. Untuk mempertahankan keberlangsungan upaya ini, perlu dilakukan evaluasi, bagaimana keberhasilan yang telah diperoleh dan apa kendala yang dihadapi di lapangan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki sistem pembelajaran melalui pembenahan kurikulum, perekrutan guru, pengayaan bahan ajar, pemutakhiran metode pengajaran, dan hal-hal lain yang mendukung keberlangsungan pengajaran bahasa daerah yang berkualitas. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam mewujudkannya. Jika ini tidak dilakukan segera, lembaga pendidikan tidak ada artinya lagi untuk dijadikan sarana penerusan antargenerasi bahasa daerah. Perencanaan bahasa atau manajemen bahasa dalam dunia pendidikan perlu segera dievaluasi dan mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alwasilah, A. Chaedar. 2000. *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2012. *Pokoknya Rekayasa Literasi*. Bandung: Kiblay Buku Utama.

- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono. 2003. *Politik Bahasa, Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Aslinda dan Leni Syfyahya. 2007. *Pengantar Sosiolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan*. Risalah Simposium Internasional Perencanaan Bahasa. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2010. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjasudjana dkk. 1978. "Struktur Bahasa Sunda Dialek Banten". Bandung: Untuk Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Jawa Barat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Iskandarwasid dkk. 1985. *Struktur Bahasa Jawa Dialek Banten*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kaelan. 2017. *Filsafat Bahasa Hakikat dan Realitas Bahasa*. Yogyakarta: "Paradigma" Yogyakarta.
- Kridalaksana, Harimurti. 1985. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Ende-Flores: Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lauder, Multamia R.M.T. 1993. *Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa di Tangerang*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia Daerah Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lauder, Multamia R.M.T. dan Allan F. Lauder. 2015. "Dialektologi dan Pelestarian Bahasa". Makalah pada Seminar Nasional Sosiolinguistik-Dialektologi dalam Konteks Kemasyarakatan dan Budaya di Indonesia di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok pada 9—10 November 2015.
- Lauder, Multamia R.M.T. 2016. "Inisiatif DPD RI Menyusun RUU Bahasa Daerah". Makalah disampaikan pada Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Gedung Merdeka Bandung, 2-4 Agustus 2016.
- Mustansyir, Rizal. 1988. *Filsafat Bahasa Aneka Masalah Arti dan Upaya Pemecahannya*. Jakarta: Prima Karya.
- Muslich, Masnur dan I Gusti Ngurah Oka. 2010. *Perencanaan Bahasa pada Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nothofer, Bernd. 1977. "Dialektgeographische Untersuchung des Sundanesischen und des Entlang der Sundanesischen Sprachgrenze Gresprochenen Javanischen und Jakarta-Malaiischen". Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln.
- Redaksi Pustaka Grhatama. 2009. *Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama.
- Rosidi, Ayip. 2006. "Mengapa KIBS (Konferensi Internasional Budaya Sunda)?" Dalam *Prosiding Konferensi Internasional Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Rumusan Kongres Bahasa Daerah Nusantara. 2016. Disampaikan pada Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Gedung Merdeka Bandung, 2-4 Agustus 2016.
- Sumantri, Maman. 1993. *Bahasa Sunda Bahasa Daerah Terbesar Kedua di Indonesia*. Bandung: Lembaga Basa jeung Sastra Sunda.
- Sumarsono. 2007. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda.
- Sunendar, Dadang. 2016. "Sambutan Kongres Bahasa Daerah Nusantara". Disampaikan pada Kongres Bahasa Daerah Nusantara di Gedung Merdeka Bandung, 2-4 Agustus 2016.
- Suriamiharja, Agus dkk. 1981. *Geografi Dialek Sunda di Kabupaten Serang*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Pusat Studi Sunda. 2004. *Bahasa dan Sastra Daerah di Kabupaten Tangerang*.

Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya. Cet. V.

Bandung: Nuansa Aulia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Wahya dan Mhhamad Adji. 2016. "Penerusan Bahasa Sunda Antargenerasi Melalui

Pengajaran di Sekolah Dasar sebagai Upaya Pemertahanan Bahasa Daerah". Dalam

*Jurnal Tutur* Volume 02, Nomor 01, Februari 2016. Denpasar: Asosiasi Peneliti Bahasa-Bahasa Daerah Lokal (APBL).

Wahya. 2016. *Bunga Rampai Penelitian Bahasa daam Perspektif Geografis*. Bandung: Semiotika.

Weinreich, Uriel. 1970. *Language in Contact*. Paris: The Hague.